

**STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN
IBNU TAIMIYAH TENTANG SYARAT-SYARAT KEPALA NEGARA**

SKRIPSI

Oleh

Mochammad Wildan Rohadatul 'Aisy

NIM. C85214039



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2018

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mochammad Wildan Rohadatul 'Aisy
NIM : C85214039
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Studi Komparasi Pemikiran Taqiyuddin an-
Nabhani dan IbnuTaimiyah Tentang Syarat-Syarat
Kepala Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Surabaya, 06 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Mochammad Wildan Rohadatul 'Aisy

NIM: C85214039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Wildan Rohadatul 'Aisy NIM: C85214039
ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Agustus 2018

Pembimbing,



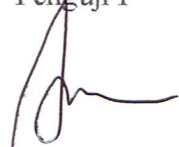
Saoki, SHI, MHI
NIP. 197404042007101004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Wildan Rohadatul 'Aisy, NIM C85214043 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Jurusan Hukum Publik Islam, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

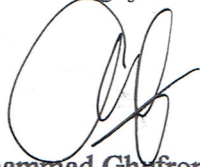
Penguji I



Sacki, SHI, MHI

NIP.197404042007101004

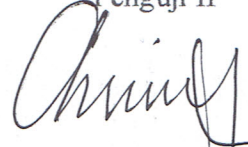
Penguji III



H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI

NIP.197602242001121003

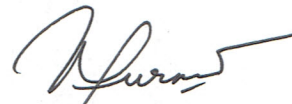
Penguji II



Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag

NIP.196006201989032001

Penguji IV



Wahid Hadi Purnomo, MH

NIP.197410252006041002

Surabaya, 06 Agustus 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mochammad Wildan Rohadatul 'Aisy
NIM : C85214039
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : mochammadwildan95@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

STUDI KOMPARASI PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN IBNU
TAIMIYAH TENTANG SYARAT-SYARAT KEPALA NEGARA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Agustus 2018

Penulis

Mochammad Wildan Rohadatul 'Aisy

1. Skripsi dengan judul **“Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah Tentang Syarat-syarat Kepala Negara dan Implementasinya di Indonesia Masa Kini”** yang ditulis oleh Muhammad Mujahid dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2004. Dalam hasil penelitiannya memperoleh beberapa poin penting yang dapat disimpulkan yaitu:

- a. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasannya persyaratan seorang kepala negara menurut Ibnu Khaldun yakni memiliki 5 syarat: 1). Ilmu Pengetahuan, 2). Al-Kifayah (Kesanggupan melaksanakan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan undang-undang), 3). Berlaku adil, 4). Bebasnya panca indera dan anggota badan, 5). Keturunan Suku Quraisy yang didasarkan pada consensus (ijma’). Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah lebih sederhana, realistis dan luwes. Menurutnya siapa saja boleh menjadi pemimpin asal memiliki 2 syarat: 1). Al-Quwwah dan Al-amanah, dan beliau menolak syarat pemimpin dari kalangan suku Quraisy karena menurut pendapat beliau berpendapat bahwasannya bertentangan dengan persamaan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran.
- b. Persyaratan yang ditetapkan oleh Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyah merupakan wacana yang bersifat normatif. Di Indonesia persyaratan-persyaratan tersebut sedikit banyak disesuaikan dan dijadikan referensi oleh wakil-wakil rakyat (DPR)

dalam merumuskan konsep tentang syarat-syarat Presiden sehingga diformulasikan dalam bentuk Undang-undang dengan harapan muncul seorang Presiden yang dapat membawa Indonesia keluar dari multi krisis, mengantarkan Indonesia menjadi negara yang makmur, aman, sentosa dan maju.

2. Skripsi dengan judul **“Syarat Kepala Negara Menurut Al-Mawardi dan Al-Ghazali”** yang ditulis oleh Youngki Sendi Kristiannando dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2014. Dalam hasil penelitiannya memperoleh beberapa poin penting yang dapat disimpulkan yaitu:
 - a. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa: pertama, Ahlul Ijtihad adalah seorang ahli fiqih (ahli hukum islam) yang mengerahkan segala daya dan kemampuannya untuk mendapatkan status hukum syar'i; kedua, Al-Mawardi dan Al-Ghazali mempunyai pandangan yang sama dalam hal kepala negara haruslah mempunyai ilmu pengetahuan. sedangkan keduanya mempunyai pandangan yang berbeda dalam hal ilmu yang dimaksud oleh Al-Mawardi mengharuskan seorang kepala negara pada level mujtahid sedangkan ilmu yang dimaksud Al-Ghazali tidak mengharuskan seorang kepala negara pada level mujtahid akan tetapi boleh juga seorang kepala negara adalah mujtahid.

pada tahun 1940, beliau di angkat sebagai Musyawir (Asisten Qadli) dan beliau terus memegang kedudukan ini hingga tahun 1945, yakni saat beliau pindah ke Ramallah untuk menjadi qadli di Mahkamah Ramallah sampai tahun 1948. Setelah itu beliau keluar dari Ramallah menuju Syam sebagai akibat jatuhnya palestina ke tangan yahudi.

Pada tahun 1948 itu pula, sahabatnya al-Ustadz Anwar al-Khatib mengirim surat kepada beliau, yang isinya meminta beliau agar kembali ke Palestina untuk di angkat sebagai qadli di Mahkamah Syar'iyah al-Quds. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mengabulkan permintaan itu dan kemudian beliau di angkat sebagai qadli di Mahkamah Syar'iyah al-Quds pada tahun 1948. Kemudian oleh Mahkamah Syar'iyah dan kepala Mahkamah Isti'naf saat itu yakni al-Ustadz Abdul Hamid As Sa'ih, beliau lalu di angkat sebagai anggota Mahkamah Isti'naf (banding), dan beliau tetap memegang kedudukan itu sampai tahun 1950. Pada tahun 1950 inilah, beliau lalu mengajukan permohonan mengundurkan diri, karena beliau mencalonkan diri untuk menjadi anggota Majelis Niyabi (Majelis perwakilan).

Pada tahun 1951, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani mendatangi kota Amman untuk menyampaikan ceramah-ceramahnya kepada para pelajar Madrasah Tsanawiyah di Kulliyah Ilmiah Islamiyah. Hal ini terus berlangsung sampai awal tahun 1953, ketika beliau mulai sibuk

Pada setiap topik yang ia sodorkan, hujjahnya senantiasa kuat, Taqiyuddin an-Nabhani memang mempunyai kemampuan yang tinggi untuk meyakinkan orang lain.

Ketika ia pindah pekerjaan ke bidang peradilan, ia senantiasa mengadakan kontak dengan para ulama yang pernah dia kenal dan temui di Mesir. Kepada mereka Taqiyuddin an-Nabhani mengajukan ide untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam untuk membangkitkan kaum Muslimin dan mengembalikan kemuliaan dan kejayaan mereka.

Untuk tujuan ini pula, ia berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di Palestina dan mengajukan ide yang sudah mendarah daging dalam jiwanya kepada tokoh tokoh terkemuka, baik dari kalangan ulama maupun para pemikir. Kedudukan Taqiyuddin an-Nabhani di Mahkamah Isti'naf di al-Quds sangat membantu aktivitasnya tersebut.

Dengan demikian, Taqiyuddin an-Nabhani dapat menyelenggarakan berbagai seminar dan mengumpulkan para ulama dari berbagai kota di Palestina. Dalam kesempatan ini, ia mengadakan dialog dengan mereka mengenai metode kebangkitan yang benar. Taqiyuddin an-Nabhani banyak berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi social Islam dan partai partai yang bercorak nasionalis dan patriotis. Ia menjelaskan kekeliruan langkah mereka, kesalahan pemikiran mereka, dan rusaknya kegiatan mereka selain itu, ia juga sering melontarkan berbagai masalah politik dalam khutbah-

pemerintahan”. Taqiyudin An Nabhani kemudian mengajukan pencalonan dirinya untuk menduduki Majelis Perwakilan. Namun karena sikap-sikapnya yang dinilai menyulitkan, aktivitas politiknya dan upayanya yang sungguh- sungguh untuk membentuk sebuah partai politik dan keteguhannya berpegang kepada agama, maka akhirnya hasil pemilu menunjukkan bahwa Taqiyuddin an-Nabhani di anggap tidak layak untuk menduduki majelis perwakilan.

Namun demikian, aktivitas politik Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani tidaklah berhenti dan tekadnya pun tiada pernah luntur. Ia terus mengadakan kontak-kontak dan diskusi-diskusi, sehingga akhirnya berhasil meyakinkan sejumlah ulama dan qadhi terkemuka serta para tokoh politikus dan pemikir untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam. Lalu ia menyodorkan kepada mereka kerangka organisasi partai dan pemikiran-pemikiran yang dapat digunakan sebagai bekal tsaqafah bagi partai tersebut. Maka aktivitasnya pun semakin menjadi padat dengan terbentuknya Hizbut Tahrir.

4. Karya-karyanya

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani wafat tahun 1977 M dan dikuburkan di perkuburan al-Auza'i di Beirut. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani telah meninggalkan kitab-kitab penting yang dapat di anggap sebagai kekayaan pemikiran yang tidak ternilai harganya. Karya-karya ini menunjukkan bahwa Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani merupakan seorang yang mempunyai pemikiran yang cerdas bijak dan beranalisis

Hadist-hadist tersebut serta hadits-hadits yang serupa dari hadist-hadist yang sah sanadnya sampai kepada Rasulullah tentang pemerintahan yang diberikan kepada Quraisy adalah hadist-hadist yang berbentuk *ikhbar* (berita) dan tidak ada satu pun diantaranya yang berbentuk *thalab* (perintah). Bentuk *ikhbar* (berita) walaupun mengandung pengertian tuntutan (*thalab*), tetapi tidak dianggap tuntutan secara pasti selama tidak dibarengi dengan suatu *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan penegasan. Sementara hadits-hadits yang ada tentang masalah tersebut tidak disertai qarinah apapun. Dengan demikian maka hadits-hadits di atas menunjukkan perintah sunnah, bukan wajib. Kesimpulannya persyaratan Quraisy itu sebagai syarat keutamaan, bukan syarat terwujudnya akad khalifah.

- f. Merdeka, seorang hamba sahaya tidak sah menjadi khalifah, karena dia adalah milik tuannya sehingga dia tidak memiliki wewenang untuk mengatur, bahkan terhadap dirinya sendiri. Dengan demikian, dia tidak layak untuk mengurus orang lain, apalagi menjadi penguasa atas manusia.
- g. Mampu memikul tugas kekhalifahan, sebab hal ini termasuk syarat yang dituntut oleh bai'at. Jadi, tidak sah bai'at kepada seseorang yang tidak sanggup untuk mengemban urusan umat (amanat khilafah) berdasarkan kitab dan sunah. Karena berdasarkan kitab dan sunah inilah dia dibai'at.
- h. Tidak mensyaratkan golongan suku Quraisy, didalam hadist-hadist yang sah sanadnya sampai kepada Rasulullah tentang pemerintahan yang diberikan kepada Quraisy adalah hadist-hadist yang berbentuk berita dan tidak ada satu pun diantaranya yang berbentuk perintah. Bentuk berita walaupun mengandung pengertian tuntutan, tetapi tidak dianggap tuntutan secara pasti selama tidak dibarengi dengan suatu indikasi yang menunjukkan penegasan. Sementara hadits-hadits yang ada tentang masalah tersebut tidak disertai indikasi apapun. Dengan demikian maka hadits-hadits di atas menunjukkan perintah sunnah, bukan wajib. Kesimpulannya persyaratan Quraisy itu sebagai syarat keutamaan, bukan syarat terwujudnya akad khalifah.

- ditemukan nama surat Saba' yang diambil dari nama negara yang dipimpin oleh ratu Bilqis (surat 34 Makkiyah). Demikian juga muatan surat al-Naml ayat 20-40 secara lebih rinci mengisahkan ratu Bilqis bersama sistem pemerintahannya yang demokratis, dan berpegang pada asas, prinsip keadilan dan kesetaraan, menghendaki perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan, baik dalam hak-hak keagamaan maupun hak-hak kewarganegaraan dan politik.⁴
- c. Amanah, sifat amanah ini dapat ditunjukkan seorang pemimpin ketika mengangkat pembantu-pembantu atau pejabat negara yang mana haruslah mengangkat orang yang pantas dan memang cakap untuk memegang posisi jabatan tertentu tersebut. Jika tidak demikian, maka berarti suatu bentuk pengkhianatan terhadap Allah, rasul dan orang mukmin. Dalam realitas ketika sulit bagi kita menemukan tipe-tipe orang yang amanah (dalam keadaan darurat) maka bolehlah memberikan jabatan pada orang yang bukan ahlinya namun tetap harus disertai komitmen untuk menyempurnakan kekurangannya.⁵
- d. Al-Quwwah, memegang peranan penting dalam konsepsi politik Ibnu Taimiyah, karena seorang kepala negara adalah pembimbing dan pengayom masyarakat. Tugas dan tanggung jawabnya sangat

⁴Muhammad Anis Qasim Ja'far, *al Huquq al Syiyasyiyyah li al Mar'ah fi al Islam wa al Fikr wa al Tasyri' al Muashir*, terj. Irwan Kurniawan., et-al., *Perempuan dan Kekuasaan* (Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998), 87-88.

⁵Ahmad Siddiq, "Etika Politik Dalam Prespektif Ibnu Taimiyah", dalam *Jurnal Al-Khoziny* (Sidoarjo: Tp, 2006), 46.

3. Taqiyuddin an-Nabhani mensyaratkan kepala negara harus Baligh, akan tetapi disini Ibnu Taimiyah tidak memberikan batasan secara jelas masalah usia untuk menjadi kepala negara.
4. Taqiyuddin an-Nabhani mensyaratkan mengenai kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala negara, yakni Berakal dan Mampu memikul tugas kekhilafahan, berbeda dengan Ibnu Taimiyah menurutnya kemampuan yang harus dimiliki kepala negara, yakni amanah dan al-Quwwah.
5. Taqiyuddin an-Nabhani mensyaratkan kepala negara harus Merdeka, akan tetapi Ibnu Taimiyah tidak memberikan definisi secara jelas masalah status sosial yang merdeka untuk menjadi kepala negara.

Dari ulasan diatas, disitulah tampak bahwa persamaan dan perbedaan dari pemikiran antara Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah terletak pada syarat-syarat kepala negara yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan pendapatnya masing-masing dalam memahami kriteria syarat-syarat pencalonan kepala negara.

Untuk memudahkan dalam memahami persamaan dan perbedaan pemikiran Taqiyuddin an-Nabhani dan Ibnu Taimiyah tentang syarat-syarat kepala negara, penulis memaparkan table sebagai berikut:

No	Syarat-Syarat Kepala Negara	Taqiyudin an-Nabhani	Ibnu Taimiyah
1.	Agama	Muslim	Muslim/non-Muslim
2.	Jenis kelamin	Laki-laki	Laki-laki/Perempuan
3.	Usia	Baligh	Tidak memberikan batasan secara jelas masalah usia untuk menjadi kepala negara
4.	Status sosial	Merdeka	Tidak memberikan definisi secara jelas masalah status sosial untuk menjadi kepala negara
5.	Kemampuan	a. Berakal b. Adil c. Mampu memikul tugas kekhalfahan	a. Amanah b. Al-Quwwah c. Adil
6.	Golongan	Tidak mensyaratkan kepala negara dari golongan suku Quraisy	Tidak mensyaratkan kepala negara dari golongan suku Quraisy

